

COMING SOON



CONSTITUTIONAL DISCUSSION #8



KERJA SAMA **INTEGRITY** LAW FIRM DAN **FH UMY**

PEMILU 2024 : MENUJU NEGARA HUKUM ATAU NEGARA MAFIOSO

Jumat, 06 Januari 2023
14.00 WIB - SELESAI

FREE
SERTIFIKAT



Keynote Speech

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner **INTEGRITY** Law Firm



Pemilu 2024 :
Daulat Rakyat atau Daulat Uang
Titi Anggraini (Perludem)



Perpu Ciptaker, Pelemahan MK,
dan Pemilu 2024
Zainal Arifin Mochtar (FH UGM)



Oligarki, Kejahatan SDA, dan
Cukong Pemilu 2024
M. Raziv Barokah
(Senior Associate **INTEGRITY** Law Firm)



Penegakan Hukum dalam Pusaran
Pemilu 2024
King Faisal Sulaiman (FH UMY)

Link Pendaftaran :

www.integritylawfirms.com/ICD8



Moderator
Anjas Rinaldi Siregar, S.H.
Associate **INTEGRITY** Law Firm

LIVE Youtube **INTEGRITY**

DOOR PRIZES! Buku dan Baju Polo
INTEGRITY Law Firm

Evaluasi dan Prediksi Hukum 2022-2023: DUITokrasi Membunuh DEMOkrasi

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner **INTEGRITY** Law Firm
Guru Besar Hukum Tata Negara
Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Yogyakarta, 6 Januari 2023

Evaluasi dan Prediksi Hukum 2022-2023: DUI Tokrasi Membunuh DEMOKrasi

- Tahun 2022: *Public Justice Killing*.
- Hukum di Bawah Bayang-Bayang Pemilu 2024.
- DUI Tokrasi Membunuh DEMOKrasi.



Evaluasi dan Prediksi Hukum 2022-2023: DUITokrasi Membunuh DEMOkrasi

- Dengan berakhirnya tahun 2022 dan hadirnya 2023, kita perlu melakukan **evaluasi**, sekaligus **prediksi** bagaimana perjalanan hukum di tanah air.
- Evaluasi adalah bagian dari upaya **mengkritisi dan ikhtiar perbaikan**, sedangkan prediksi adalah langkah antisipasi dan **mencari solusi atas masalah hukum** yang akan timbul di tahun-tahun mendatang.



Sumber: Republika



Sumber: Wisdom Springs

Tahun 2022: Public Justice Killing

- Pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat adalah “**Skenario Sambo**” yang menjadi serial sinetron, bagaimana nyawa dihilangkan, dan **hukum coba dipertainkan**.
- **Bagaimana ujungnya?** Masih akan terus kita tonton dan sibuk perdebatkan. Tetapi apakah serial Sambo itu akan merubah wajah penegakan hukum kita menjadi lebih adil?



Sumber: detik.com

Tahun 2022: Public Justice Killing

- Tidak! Pembunuhan Brigadir Yosua adalah potret bagaimana **hukum seringkali direayasa** untuk melindungi **kaum elit berkuasa**, berhadapan dengan kawula alit rakyat jelata.
- Sambo yang punya kuasa, sempat merangkai cerita dan membelokkan fakta. Bagaimana kejadian sebenarnya, harusnya terkuak **di depan mata hakim, jika hukum bekerja sesuai idealita.**



Sumber: Sindo News



Sumber: Hukum Online

Tahun 2022: Public Justice Killing

- Namun, Sambo dan kasusnya adalah satu cerita, tentang bagaimana satu nyawa merenggang derita. Yang lebih merisaukan sebenarnya adalah, banyak cerita lainnya, **yang tidak viral dan menjadi berita.**
- ***No viral no justice.*** Hari-hari Indonesia sejujurnya penuh kisah nestapa bagaimana banyak keadilan publik di bunuh, tanpa ada hukum yang ditegakkan.



Sumber: ProAktif Media

Tahun 2022: Public Justice Killing

- Pembunuhan keadilan publik (*public justice killing*) kerap berlangsung melalui berbagai praktik **mafia hukum**, yang berkelindan dengan **mafia politik**, yang terus menggerogoti sistem hukum kita.
- Sambo-sambo dalam pembunuhan keadilan publik tersebut, adalah para **elit penguasa** yang berkolusi dengan kekuatan **oligarki** pengusaha, dan **korbannya adalah rakyat jelata** yang kehilangan nyawa, ataupun ruang berusaha untuk mempertahankan hak hidupnya.



Tahun 2022: Public Justice Killing

- Di **Kalimantan Selatan** di penghujung 2021, seorang advokat Jurkani ditebas sekujur tubuhnya, dan akhirnya merenggang nyawa. Dia menjadi korban praktik tambang ilegal (*illegal mining*) batu bara yang mewabah di seantero Banua (Kalsel), seiring dengan tingginya harga komoditas itu di dunia.
- Yang menjadi terpidana adalah pelaku lapangannya, sedangkan aktor intelektual, tidak pernah berhasil diminta pertanggungjawaban di hadapan sidang terbuka. Modusnya jamak alias biasa. Bersembunyi dibalik “Skenario Sambo”, dengan menjadi **oligarki** yang terus tidak tersentuh hukum (*the untouchable*).

Advokat di Kalsel, Jurkani, Meninggal Usai Dibacok, Haji Denny Berduka

kumparanNEWS

3 November 2021 13:10 · waktu baca 2 menit

♡ 3 💬 0 📧 🌐 ⋮



Tim Advokasi Jurkani Nilai Ada Kejanggalan dalam Vonis Dua Pelaku Pembunuhan

Rabu 23 Feb 2022 15:38 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Andri Saubani



Tahun 2022: Public Justice Killing

- Masih soal kutukan sumber daya alam kita. Datanglah ke **Sulawesi Tenggara**. Kami mengadvokasi beberapa kasus hukum penambangan nikel di sana. Masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan, berjuang agar **pulau kecil Wawonii tidak ditambang**, karena sudah pasti akan merusak lingkungan.
- Namun, korporasi tak lelah berusaha. Perda RTRW diubah, sehingga **izin tambang**, meskipun tanpa kajian lingkungan yang seharusnya, berhasil diperoleh untuk nikel di bawa jauh ke China.

Perda Dibatalkan MA, Denny Indrayana Minta Penambangan di Wawonii Dihentikan

kumbaranNEWS



BERANDA BLOG REGULASI PUBLIKASI

Wawonii Pulau Kecil Bukan untuk Tambang, Cabut Izin PT Gema Kreasi Perdana!

Jumat, 18 Maret 2022 Siaran Pers 2704

Informasi Perkara
MAKAMAH AGUNG RI

< Kembali

57 P/HUM/2022

Status : Perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasasi oleh Majelis

Pengadilan Pengaju

Nomor Perkara Pengadilan Tk. 1

No Surat Pengantar

Jenis Permohonan
P/HUM

Jenis Perkara
TUN

Klasifikasi

Tanggal Masuk
Rabu, 21 Sep 2022

Tanggal Distribusi
Kamis, 1 Des 2022

Pemohon
ABIDIN, DKK

Termohon / Terdakwa
1. BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

Ketua Majelis
Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN

Anggota Majelis 1
Dr. H. Yosran, SH., M.Hum

Anggota Majelis 2
H. Is Sudaryono, SH., MH

Panitera Pengganti
Dr. Maftuh Effendi, SH., MH

Tanggal Putus
Kamis, 22 Des 2022

Amar Putusan
KABUL PERMOHONAN KEBERATAN HUM

Tanggal Minutasi

Tanggal Kirim ke Pengadilan Pengaju

Link Dokumen Putusan

Ikhtisar Proses Perkara

Usia Perkara : 28 Hari

Lama Memutus : 22 Hari

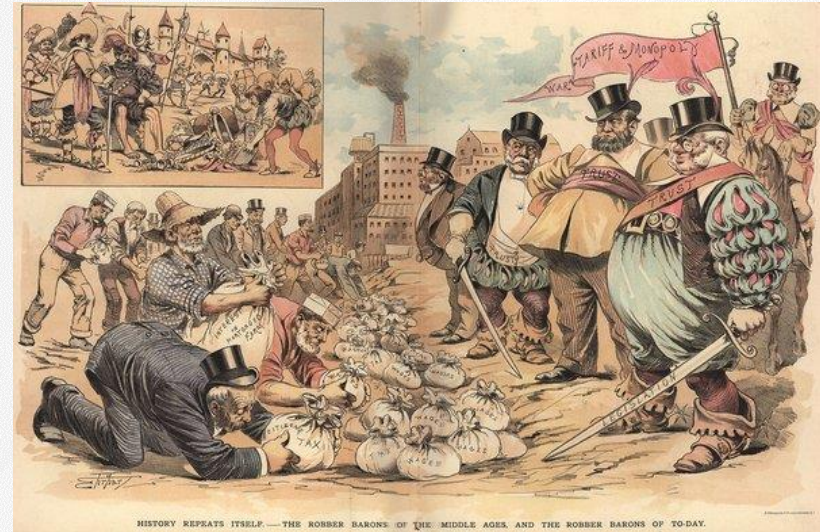
Tahun 2022: Public Justice Killing

- Negara gagal menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagai amanat **Pasal 33 UUD 1945**.
- Faktanya, Negara justru, melalui oknum pejabatnya, menjadi hamba-sahaya kepentingan **bisnis oligarki** dengan imbal balik bantuan atas biaya politiknya.



Tahun 2022: Public Justice Killing

- Amanah penguasa negara untuk menjaga kepentingan publik, berubah arah menjadi beking kepentingan privat. Lebih cilaka lagi kalau sang penguasa juga **secara terbuka atau sembunyi-sembunyi ikut berbisnis.**
- Aparat penegak hukum, tidak berdaya, karena seringkali ikut menikmati setoran \$2 dollar per ton batu bara. Atau ikut punya izin usaha, meskipun melalui tangan pihak ketiga, sering disebut modus “**Ali-Baba**” dengan menyalahgunakan pemilik keuntungan sesungguhnya (*beneficial ownership*).



Sumber: Quora.com

BENEFICIAL OWNERSHIP, BUKA KEDOK BERLAPIS PEMILIK PENAMBANGAN



BENEFICIAL OWNERSHIP BUKA KEDOK BERLAPIS PEMILIK PENAMBANGAN



PUBLIKASI BO



Sumber: EITI Indonesia

Tahun 2022: Public Justice Killing

- Jika penguasa negara sudah ikut berniaga, maka kepentingan umum (publik) **akan dikalahkan** oleh kepentingan pribadi (privat).
- Maka dikhianatilah sumpah jabatan, dan akibatnya pembunuhan keadilan publik (*public justice killing*) menjadi merajalela. Sambo-sambo sang raja rekayasa menjadikan negara hukum hanya wacana tanpa realita.



Sumber: PA Nabire



Sumber: Sketsindonews.com

- Evaluasi dan prediksi hukum makin rumit dikaitkan dengan agenda politik Pemilu 2024.
- Meskipun sibuk dibantah di panggung depan, bahwa panggung belakang politik kita **penuh dengan intrik dan rekayasa politik-hukum saling sandera.**
- Hukum akhirnya hanya dijadikan instrumen, untuk **mengancam, saling tawar posisi, dan penentuan arah koalisi.**



Sumber: Media Indonesia

Hukum dalam Bayang-Bayang Pemilu 2024



- **Partai oposisi, akan diupayakan terus melemah.** Partai Demokrat coba dikuasai, meskipun berhasil digagalkan, paling tidak sementara. Partai Keadilan Sejahtera berhasil dibelah dua.
- Ketua Umum parpol yang tidak ikut skenario besar, **dilengserkan**—salah satunya karena berani-beraninya menerima tokoh calon presiden yang bukan favorit penguasa di rumah dinas menteri.



- Setiap pimpinan parpol, sudah ada **sandera** kasus hukumnya di kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK.
- Tidak terkecuali tokoh nasional yang pernah maju di Pemilu 2019, juga punya tabungan kasus terkait pembelian **Bank Banten**, yang dokumennya sudah lengkap, dan tinggal diangkat, jika sang tokoh **tidak tunduk pada skenario koalisi kemenangan Pemilu 2024**.

detikNews > Berita

Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan Tersangka Kasus Korupsi Bank Banten

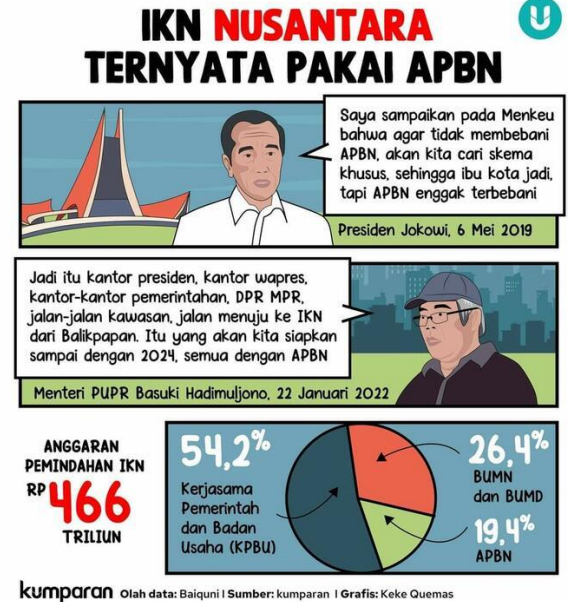
Bahtiar Rifa'i - detikNews

Selasa, 13 Sep 2022 12:52 WIB

Hukum dalam Bayang-Bayang Pemilu 2024



- Maka, penentuan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024 bukanlah berdasarkan siapa kandidat terbaik menurut rakyat, tetapi ditentukan oleh **kepentingan melanggengkan status quo utamanya kepentingan usaha pasca Presiden Jokowi.**
- Termasuk **bisnis membangun proyek Ibu Kota Negara, yang nilainya fantastis disebutkan 466 triliun.** Tidak aneh juga kalau angka itu akan meningkat tajam. Seperti terjadi pada proyek partikelir PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang anggarannya terus naik, dan akhirnya ikut dijamin pemerintah, alias **menambah beban utang negara.**



Hukum dalam Bayang-Bayang Pemilu 2024



- KPK sudah **dikuasai dan dilumpuhkan**.
- Proses seleksi pimpinannya pada 2023, lagi-lagi akan diwarnai *bargaining* untuk menyerang lawan dan menyenangkan kawan, alias bagian dari **strategi kemenangan Pemilu 2024**.



Sumber: Kumparan.com

detikNews > Kolom

Kolom

Melanjutkan Proses Hukum Kasus Gratifikasi Wakil Ketua KPK

Alif Fachrul Rachman - detikNews

Selasa, 26 Jul 2022 14:30 WIB

Hukum dalam Bayang-Bayang Pemilu 2024



- **Mahkamah Konstitusi telah dikuasai dan telah dipersiapkan untuk Pemilu 2024**
- Intervensi seleksi Hakim MK untuk persiapan sengketa hasil pemilu.
- Pemberhentian Hakim Aswanto yang menabrak konstitusi, penerbitan Perppu 2 Tahun 2022 yang melecehkan putusan MK, **menunjukkan MK sudah pula dikuasai dan coba diletakkan dalam strategi kemenangan Pemilu 2024**, yang tentunya akan bertentangan dengan prinsip dasar *free and fair election*.

INTEGRITY IN TE
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY GRI TY

SIARAN PERS
**PERPPU CIPTA KERJA, CARA AKROBATIK
TIDAK MENGHORMATI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI?**
Guru Besar Hukum Tata Negara
Senior Partner INTEGRITY Law Firm
Registered Lawyer di Australia dan Indonesia

Mantan Hakim Konstitusi: Pencopotan Aswanto Serangan Terhadap Kemandirian MK

Mantan Hakim Konstitusi: Pencopotan Aswanto Serangan Terhadap Kemandirian MK

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Upaya Sistematis Mengendalikan Mahkamah

Share

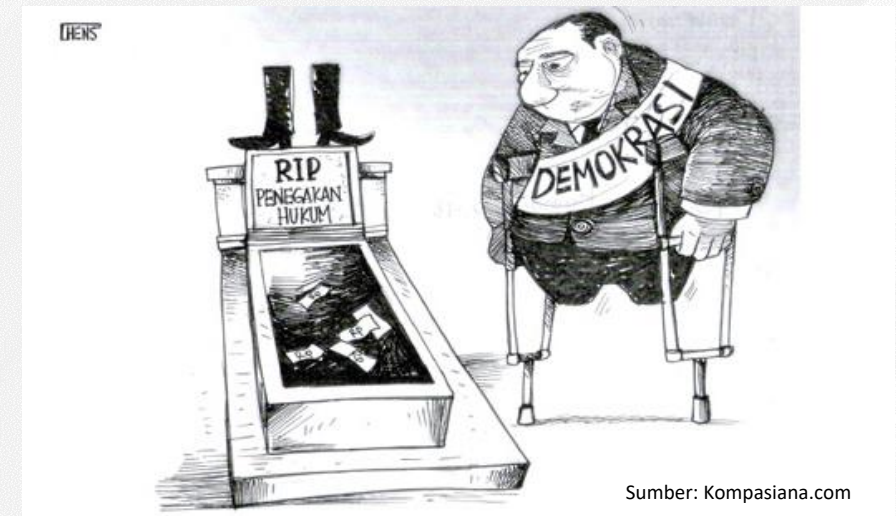
Terbaru

4 Oktober 2022

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Upaya Sistematis Mengendalikan Mahkamah

DUITokrasi membunuh DEMOKrasi

- Wajah hukum Indonesia bisa dikatakan dikuasai oleh satu kata, bukan demokrasi, tapi **DUITOKRASI**.
- Demokrasi adalah saat kedaulatan ada di tangan rakyat, dan negara hukum dijunjung tinggi. Duitokrasi adalah antitesanya, saat **kedaulatan dibajak oleh kekuatan duit**, dan negara hukum direndahkan hanya menjadi komoditas transaksi jual-beli yang diperdagangkan.



DUITokrasi membunuh DEMOkrasi

- Dalam demokrasi, pemilu adalah pesta rakyat yang menghasilkan para pemimpin yang **amanah, tunduk dan patuh pada kepentingan warga bangsa**.
- Dalam duitokrasi, **pemilu adalah pesta segelintir elit kuasa**, yang diiringi dengan **tawa suka-cita kaum oligarki**.



Sumber: KPPOD

DUITokrasi membunuh DEMOkrasi

- Dalam demokrasi, presiden adalah pilihan rakyat.
- Dalam duitokrasi, presiden adalah pilihan duit.
- Dimana **demokrasi telah dibajak dan dibunuh oleh duitokrasi**. Dimana **politik curang dan politik uang** dijadikan mantra dan didewa-dewakan sebagai kebiasaan dan keniscayaan yang tak masalah dilakukan.



Sumber: Kabar24



Sumber: Liputan 6.com

DUITokrasi membunuh DEMOkrasi

- Dalam duitokrasi, rakyat tidak berdaulat, dan hanya disuguhi tontonan “Sinetron Sambo” yang meninabobokkan.
- Padahal **penguasa dan oligarki berpesta-pora nikel dan batubara sambil meluluh-lantakkan lingkungan Indonesia, dan tatanan negara-bangsa Indonesia kita.**

detikNews > Berita

5 Fakta Ledakan di Tambang Sawahlunto Tewaskan 10 Pekerja

Tim detikcom - detikNews

Sabtu, 10 Des 2022 14:24 WIB



Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Otomotif Hiburan Gaya Hidup

Cuaca Buruk Rokok Batangan Piala Aff 2022 Sidang Ferdy Sambo

Home > Nasional > Peristiwa

Komunitas Sebut Hutan Sumbar Berkurang 27 Ribu Ha Imbas Tambang Ilegal

CNN Indonesia

Kamis, 05 Jan 2023 01:15 WIB

DUITokrasi membunuh DEMOkrasi

Kompas.com / News / Nasional

KALEIDOSKOP NASIONAL 2022

[KALEIDOSKOP 2022] Jejak Putusan Hakim Agung, Saat "Wakil Tuhan" Jual Belikan Keadilan

- Dalam duitokrasi, tiap hari kita melihat pembunuhan ala “Brigadir Yosua”, yaitu pembunuhan keadilan publik (**public justice killing**) yang melecehkan hukum, karena oknum penguasa dan aparat hukumnya, justru **menjelma menjadi penjahat negara** yang hanya menghamba pada kardus dollar Amerika, Singapura, ataupun Yen China.

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- **INTEGRITY Constitutional Discussion**
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yuseus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kaltas STIR - Jakarta

SESI III
Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Pulis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMKATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 13.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Souvenir Buku dari Penerbit

MATERI TRAINING

SESI I

1. Mengapa Tidak Polusi Korupsi Berlakuk?
2. Mengapa Tidak Polusi Persepsi yang Berlakuk?

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Persepsi yang Berlakuk?
2. Mengapa Persepsi dan Persepsi yang Berlakuk?
3. Mengapa Persepsi Berlakuk?

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Good Corporate Governance bagi Korporasi

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Membangun Persepsi yang Berlakuk melalui Sistem Manajemen Anti Korupsi (SMAP)
3. Mengaplikasikan Pengukuran Internal Korporasi Melalui Pengukuran WSI 2017/2018 (Self-Assessment Management System)

SESI V

1. Pengukuran grafik: orang dan berapa pendirian kepala publik official
2. Strategi membangun public official yang memiliki yang lebih
3. Studi kasus

SESI VI

1. Strategi Kasus Korupsi di BUKM dan Anti Persepsi BUKM
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUKM dan Anti Persepsi BUKM
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 100.000,- Full Paket Materi (Materi Training dan Materi 3 hari)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5011000000
KCS PO INDAH WATI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link <https://integritylawfirms.com/australia/>

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denay Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bi. Faisal H. Rani, S.E., M.A.

MODERATOR
Karnis, 12 Agustus 2021 Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Muh. Mahfud MD, Wakil Ketua MK RI Yudi Latief, Ketua PKH Indonesia Arnel Sam, Wakil Ketua MK RI

MODERATOR

Muhammad Nur, Wakil Ketua MK RI Denay Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

Tersedia e-certificate

Karnis, 30 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denay Indrayana, Senior Partner INTEGRITY Law Firm Muli, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Rully Harun, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

MODERATOR

Muhammad Nur, Wakil Ketua MK RI Yudi Latief, Ketua PKH Indonesia Arnel Sam, Wakil Ketua MK RI

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

Tersedia e-certificate

Karnis, 17 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

<https://integritylawfirms.com/australia/>





<https://www.integritylawfirms.com>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836